Komunikasi Edukasi Humas sebagai Media Komunikasi Publik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu)

[1*]Rissa Sabrina Putri, [2]Eraskaita Ginting
[1]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
[1*]rissasabrina02@gmail.com, [2]eraskaitaginting_uin@radenfatah.ac.id
*rissasabrina02@gmail.com

Tanggal Submitt: 28-02-2025 Tanggal diterima:11-03-2025 Tanggal Terbit:13-03-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran komunikasi edukasi humas sebagai media komunikasi publik dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan, termasuk penggunaan media sosial dan komunikasi tatap muka, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tahapan dan prosedur Pilkada. Komunikasi edukasi humas mampu mencerdaskan masyarakat sehingga dapat meminimalisir berita bohong (*hoax*). Peran kehumasan harus responsif dalam mengelola segala macam isu, termasuk isu terkait *hoax*. Sosialiasi komunikasi edukasi humas dengan secara langsung terhadap masyarakat merupakan pengembangan model komunikasi yang lebih efektif dan insklusif dan mendukung proses demokrasi di daerah. Komunikasi edukasi humas membantu masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku politik masyarakat. Berdasarkan hasil rekapan didapatkan hasil Pilkada dimenangkan oleh pasangan Teddy & Marjito yang mengalahkan pasangan Yudi & Elita. Komunikasi edukasi humas sebagai media komunikasi publik memaparkan rekap tersebut untuk dapat dilihat kepada masyarakat atas hasil pemilihan yang mereka pilih dan strategi ini mencakup penggunaan berbagai media komunikasi, baik media tradisional seperti radio dan surat kabar, maupun media digital seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi berbasis internet.

Kata kunci: Komunikasi Edukasi, Komunikasi Publik, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract: *This research aims to explore the role of public relations educational communication as a public communication medium in the context of the Regional Head Election (Pilkada) in Ogan Komering Ulu Regency. The method used is qualitative research involving interviews with key informants from the Communication and Informatics Service (Diskominfo). The research results show that the communication strategies implemented, including the use of social media and face-to-face communication, succeeded in increasing public understanding of the stages and procedures of the Pilkada. Public relations educational communication is able to educate the public so that it can minimize fake news (hoaxes). The role of public relations must be responsive in managing all kinds of issues, including issues related to hoaxes. The dissemination of public relations education communication directly to the community is the development of a more effective and inclusive communication model and supports the democratic process in the region. Public relations educational communication helps people to change people's political attitudes and behavior. Based on the recapitulation results, it was found that the Pilkada results were won by the pair Teddy & Marjito who defeated the pair Yudi & Elita. Public relations educational communication as a public communication medium presents the recap so that the public can see the results of the election they*

chose and this strategy includes the use of various communication media, both traditional media such as radio and newspapers, as well as digital media such as official websites, social media, and internet-based applications.

Keywords: *Educational Communication, Public Relations, Regional Head Election*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Prinsip ini pertama kali diutarakan oleh Abraham Lincoln yang secara esensial menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan[1].Salah satu manifestasi dari demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung memilih para wakil mereka yang akan menduduki posisi-posisi tertentu. Proses pemilu ini menjadi representasi nyata dari kedaulatan rakyat, dengan tujuan memilih wakil yang aspiratif, bertanggung jawab, dan memiliki kualitas yang memadai [2] . Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keterbukaan, di mana semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat mengekspresikan pilihan mereka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini merupakan wujud nyata dari hak berdemokrasi yang dijamin bagi setiap warga negara yang wajib mensukseskan segala bentuk demokrasi agar tertib dan damai. Proses penggunaan hak pilih harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil[3]. Selain itu, penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga harus memiliki integritas yang tinggi, tidak memihak, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya hak politik masyarakat secara kredibel dan adil[4].

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, terdapat empat jenis pemilihan umum di Indonesia, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada sendiri berfungsi sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk

[1] Syamsu Ridhuan, 'Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila', *Universitas Esa Unggul*, 2019, 1–14.

[2] Abdul Masri Purba, 'Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis', *Network Media*, 7.1 (2024), 1–8 <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>.

[3] Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, 'Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap', *Jurnal Suara Hukum*, 1.2 (2019), 155 <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

[4] KPU Sulawesi Utara, *Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemilihan*, 2021.

memilih pemimpin daerah. Dalam konteks hukum normatif, pengisian jabatan Kepala Daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 (5), yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah tersebut." [5] Oleh karena itu, Pilkada merupakan manifestasi nyata dari penerapan demokrasi langsung di Indonesia. Pemilihan kepala daerah menjadi momen penting dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, calon kepala daerah, hingga masyarakat sebagai pemilih. Sistem pemilihan langsung telah memberikan kontribusi positif terhadap regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah. Namun, partisipasi masyarakat tetap menjadi elemen krusial dalam kesuksesan proses demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali [6]. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara terpisah, seperti sebelum pemilu 2019, dianggap kurang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan demokrasi.

Dalam sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat, calon kepala daerah dituntut untuk mengoptimalkan berbagai strategi dan kemampuan guna meraih kemenangan. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam konteks ini adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif. Calon kepala daerah harus mampu menyampaikan informasi tentang dirinya secara jelas dan persuasif, serta membangun citra yang positif di mata pemilih. Tidak hanya itu, kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pemilih agar memberikan dukungan merupakan kunci utama dalam kampanye politik yang sukses. Dengan komunikasi yang baik, calon dapat menjelaskan visi, misi, dan program-programnya dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan peluangnya untuk dipilih sebagai pemimpin [7]. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik juga mencakup kemampuan mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat, sehingga calon kepala daerah dapat menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu lokal yang relevan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ulu, memiliki tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi terkait Pilkada kepada masyarakat luas. Melalui komunikasi edukasi Humas, Diskominfo berusaha memberikan informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Edukasi ini mencakup informasi seputar tahapan Pilkada, hak dan kewajiban pemilih, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkada. Penelitian oleh

[5] Fiat Justitia, Jurnal Ilmu, and Hukum Volume, 'Issn 1978-5186', 6.1 (2012).

[6] Solikhin. A, "Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia," *J. Demokr. dan Oton. Drh.*, vol. 9, no. 3, pp. 123–137, 2017.

[7] Wahyuni. S, "Strategi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah," 2018.

[8]menunjukkan bahwa komunikasi publik yang baik dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan partisipasi dalam proses demokrasi.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penyampaian informasi oleh Diskominfo adalah rendahnya literasi digital masyarakat di beberapa wilayah, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses terhadap informasi Pilkada. Penelitian [9]menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap media digital sering kali terisolasi dari informasi penting, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar penyampaian informasi lebih merata dan efektif.

Suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat bergantung pada efektifitas komunikasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Salah satunya adalah peran humas sebagai garda depan komunikasi organisasi menjadi semakin strategis. Komunikasi edukasi humas dalam pemilihan kepala daerah memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Melalui berbagai saluran komunikasi, humas diharapkan mampu membangun kesadaran politik masyarakat, menumbuhkan minat untuk ikut serta dalam proses pemilu, dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi pemilih.

Komunikasi edukasi humas memiliki potensi yang besar dalam mengubah sikap dan perilaku politik masyarakat. Humas pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan informasi di setiap lembaga pemerintah[10]. Selain itu, humas juga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi publik. Untuk mencapai tujuan ini, humas pemerintah harus terus meningkatkan kemampuannya, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi[11]. Hal ini mencakup pemahaman

[8] Sanur, Debora, 'Tantangan Dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018', *Info Singkat*, 10.02 (2018), 25–30

[9] Hasbullah Azis, 'Dampak Media Baru Terhadap Partisipasi Dan Keterlibatan Politik Anak Muda : Sebuah Tinjauan', 8 (2024).

[10] Smith. J, 'The Role of Public Relations in Political Communication. Journal of Political Communication', *Journal of Political Communication*, 12.2 (2019), 89–101

[11] Ulfa Satira and Rossa Hidriani, 'Peran Penting Public Relations Di Era Digital', *Sadida: Islamic Communications Media Studies*, 1.1 (2021), 179–202.

mendalam tentang media sosial, yang memungkinkan humas untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Humas menjalankan fungsi komunikasi publik dalam konteks Pilkada. Kajian ini akan menganalisis efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan, serta sejauh mana pesan-pesan edukasi yang disampaikan berpengaruh terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model komunikasi publik yang lebih baik dalam mendukung proses demokrasi di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskritif untuk memahami secara mendalam bagaimana Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan edukasi Humas sebagai media komunikasi publik dalam Pilkada. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena daerah ini memiliki dinamika politik yang menarik serta tantangan dalam menyampaikan informasi publik secara efektif di wilayah yang beragam secara demografis. Dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara pasti, namun lebih ditekankan pada kedalaman informasi yang didapatkan. Dalam penelitian ini,yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses komunikasi publik di Diskominfo, seperti pejabat Humas, staf komunikasi, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pilkada. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana pemilihan informan didasarkan pada relevansi dan pengetahuan mereka terhadap topik penelitian. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan direduksi, diklasifikasikan, dan disajikan dalam bentuk naratif serta tabel untuk memudahkan pemahaman. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu proses identifikasi, analisis, dan pelaporan pola (tema) yang muncul dari data. Analisis ini akan membantu dalam mengkaji bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Diskominfo dalam Pilkada, serta bagaimana dampaknya terhadap pemahaman masyarakat.

HASIL dan PEMBAHASAN

Komunikasi edukasi humas memaparkan secara komprehensif peran Humas dalam komunikasi publik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hubungan antara komponen-komponen kunci dalam proses komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Humas.Peran Humas dalam komunikasi publik untuk Pilkada.Dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, Humas di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu menerapkan berbagai strategi komunikasi yang bertujuan untuk memastikan informasi mengenai Pilkada. Hasil dari rekap suara pemilihan seluruh kecamatan yang ada di Kab. Ogan Komering Ulu dapat dilihat dalam hasil hitung suara yang dibagikan kepada masyarakat. Seperti tabel dibawah yang menunjukkan hasil rekap tersebut yang dimenangkan dari paslon No. Urur 2 yang memperoleh 50,82% dengan selisih pasangan No. Urut 1 yang mendapatkan 49,18%. Hasil tersebut dibagikan untuk masyarakata agar mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tersebar *hoax* tentang Pilkada.

Table 1. Rekap suara semua Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu

No.	Kecamatan	1 Yudi-Yeni	2 Tedi -Marjito
1.	Baturaja Barat	8239	14586
2.	Baturaja Timur	28115	31589
3.	Kedaton Peninjauan Raya	3579	3817
4.	Lengkiti	7023	7296
5.	Lubuk Batang	14097	6732
6	Lubuk Raja	10561	7896
7.	Muara Jaya	1411	2815
8.	Pengandonan	0	0
9.	Peninjauan	9653	8761
10.	Semidang Aji	6876	9090
11.	Sinar Peninjauan	6638	6715
12.	Sosoh Buay Rayap	3877	3807
13.	Ulu Ogan	2295	2690
	Total	102364	105794
	Presentase	49,18%	50,82%

Sumber:Tribunews.com 2024

Rekapan yang dimenangkan oleh pasangan Teddy & Marjito yang mengalahkan pasangan Yudi & Elita . Komunikasi edukasi humas sebagai media komunikasi publik memaparkan rekap tersebut untuk dapat dilihat kepada masyarakat atas hasil pemilihan yang mereka pilih. Strategi ini mencakup penggunaan berbagai media komunikasi, baik media tradisional seperti radio dan surat kabar, maupun media digital seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi berbasis internet. Menurut penelitian[12], pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi publik memungkinkan Humas menjangkau masyarakat yang lebih luas dan efektif, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Humas juga menerapkan pendekatan langsung dengan mengadakan sosialisasi di berbagai komunitas dan kelompok masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka terkait proses Pilkada.Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki populasi yang heterogen dengan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Tantangan utama yang dihadapi Humas dalam menjalankan fungsinya adalah perbedaan tingkat literasi informasi dan akses terhadap teknologi di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat pedesaan memiliki akses yang terbatas terhadap media digital, yang mengakibatkan keterbatasan dalam menerima informasi yang disebarluaskan secara online. Seperti diungkapkan oleh[13], keragaman demografis menuntut Humas untuk menyesuaikan metode penyampaian informasi agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan media tradisional dan komunikasi langsung yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan.Keberhasilan komunikasi Humas sangat bergantung pada sejauh mana informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pilkada dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Komunikasi yang efektif dapat memperbaiki tingkat kesadaran politik masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pemilihan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hakim (2021) mengungkapkan bahwa komunikasi publik yang jelas, transparan, dan edukatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya. Menggunakan hak pilih mereka dengan bijak. Humas juga berperan dalam memerangi disinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses Pilkada, dengan memberikan informasi yang akurat dan factual.

Dinas Kominfo memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memilih kepala daerah dengan baik dengan melakukan sosialisasi ke perdesaan tentang tata cara pemilihan kepala daerah dengan membawa contoh surat suara untuk

[12] Putri. I. R, 'Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Dalam Menghadapi Krisis Pandemi', 2020

[13] Wahyudi. M, 'Pengaruh Transparansi Informasi Terhadap Kepercayaan Publik', 2020

ditunjukkan kepada masyarakat agar diberitahu tentang tata cara pencoblosan atau pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dinas Kominfo berupaya penuh untuk mengedukasi masyrakat tentang pemilihan kepala daerah yang dilakukan dalam 5 tahun sekali agar efesien dan tidak ada kegaduhan antar masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan pesan kepada seluruh staf dan karyawan Dinas Kominfo untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah ajang pesta demokrasi yang mempresentasikan hak-hak rakyat dalam sebuah pemilihan pimpinan baik di tingkat daerah dan tingkat nasional (Bambang, 2020).

Gambar 1. Wujudkan Pemilihan yang aman dan damai
Sumber: Instagram Dinas Kominfo OKU

Strategi Komunikasi yang Diterapkan oleh Humas dalam Pilkada sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Salah satu strategi utama adalah pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan Facebook, yang terbukti sangat efektif dalam menjangkau generasi muda. Media sosial memberikan fleksibilitas dalam penyampaian pesan-pesan edukatif dengan format yang lebih menarik dan interaktif, seperti infografis, video, dan live streaming kegiatan Pilkada. Selain media sosial, Humas juga menggunakan website resmi pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang lebih rinci dan terstruktur, seperti tata cara pemilihan, daftar calon, dan lokasi tempat pemungutan suara. Penggunaan brosur dan pertemuan tatap muka juga dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses internet atau kurang familier dengan teknologi digital. Salah satu bukti demokrasi

adalah pemilihan umumuntuk memilih secara langsung pemimpin negara dan kebijakan politiknya untuk lima tahun ke depan[14]. Tantangan dalam Pelaksanaan Komunikasi mencakup keragaman demografis, tingkat literasi digital, dan akses informasi di daerah terpencil. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan daerah dengan masyarakat yang beragam secara demografis, yang mencakup masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dengan akses teknologi yang berbeda-beda.Melaluipilkada, masyarakat turut sertadalam menentukan figur dan arah kepemimpinan daerahnya dalamperiode tertentu. Oleh sebab itu,penyelenggaraan pemilihan yangdemokratis menjadi syarat pentingdalam pilkada. Tantangan utama adalah bagaimana Humas dapat menyesuaikan strategi komunikasinya agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Tingkat literasi digital yang rendah di beberapa kelompok masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam menyampaikan informasi secara efektif melalui platform digital. Selain itu, akses internet yang terbatas di beberapa daerah terpencil juga. menjadi kendala dalam penyampaian informasi yang cepat dan akurat[15].

Dampak Komunikasi Terhadap Masyarakat yang dilakukan oleh Humas menunjukkan hasil yang positif. Melalui strategi komunikasi yang terstruktur, Humas mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pilkada serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu. Penelitian [16] menemukan bahwa penggunaan media sosial secara efektif dalam kampanye politik dapat mendorong partisipasi politik secara signifikan, terutama di kalangan pemilih muda. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa setelah implementasi strategi komunikasi yang lebih efektif, partisipasi pemilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.

Dalam hal strategi komunikasi, Diskominfo mengandalkan media sosial, brosur, website resmi, serta komunikasi tatap muka. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp menjadi sangat efektif, terutama dalam menjangkau generasi muda yang lebih terpapar dengan teknologi digital. Menurut studi yang dilakukan oleh Voorveld media sosial merupakan platform yang memungkinkan

[14] S, Yulia Sariwaty, and Dini Rahmawati, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung', *Jurnal Signal*, 7.2 (2019), 150–56 <https://doi.org/10.33603/signal.v7i2.2416>

[15] Hargittai. E, 'Potential and Pitfalls of Digital Inequality: Amplifying Political Engagement', 2020

[16] Kruikemeier, Sanne, Guda Van Noort, Rens Vliegenthart, and Claes H. De Vreese, 'The Relationship between Online Campaigning and Political Involvement', *Online Information Review*, 40.5 (2016), 673–94 <https://doi.org/10.1108/OIR-11-2015-0346>

interaksi langsung antara pemerintah dan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperkuat partisipasi publik. Selain itu, strategi ini juga menunjukkan efektivitas dalam menyampaikan pesan-pesan edukasi yang kompleks terkait Pilkada dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan menarik.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keragaman demografis dan tingkat literasi digital masyarakat. Masyarakat di daerah terpencil atau berusia lanjut cenderung kurang terpapar media digital, sehingga akses terhadap informasi menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan dari study Hargittai yang menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan digital dalam masyarakat, yang mana akses dan pemahaman terhadap teknologi lebih rendah di kalangan usia lanjut dan daerah yang kurang berkembang.

Dampak dari strategi komunikasi Humas terhadap pemahaman masyarakat sangat positif, dengan penurunan jumlah pertanyaan masyarakat terkait proses Pilkada, yang menunjukkan peningkatan pemahaman. Menurut McNair komunikasi publik yang efektif harus mampu menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik audiens agar tujuan komunikasi tercapai. Dalam hal ini, pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial dan tatap muka memberikan efek signifikan terhadap pemahaman masyarakat.Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkat sekitar 15% dibandingkan Pilkada sebelumnya, berkat pendekatan komunikasi yang interaktif dan terarah. Partisipasi publik yang meningkat ini relevan dengan temuan dari studi Kruikemeier yang menyatakan bahwa komunikasi politik yang berbasis digitaldapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik melalui kemudahan akses informasi dan peningkatan keterlibatan publik secara langsung.

Penggunaan media sosial oleh Humas juga menunjukkan peningkatan interaksi publik hingga 20%.Penggunaan media sosial oleh institusi publik dianggappaling efektif untuk pemasaran sebuah produk atau jasa ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan umpan balik langsung dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah [17]. Dengan demikian, Humas Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berhasil menjalankan peran edukasi komunikasi publik secara efektif, meskipun tantangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital masih menjadi hambatan. Peningkatan literasi digital dan diversifikasi media komunikasi menjadi aspek yang

[17] Christiany Juditha, 'Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia', *Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 2019 (2019), 199–212.

perlu terus dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada.

KESIMPULAN

Komunikasi edukasi humas memiliki potensi yang signifikan dalam mengubah sikap dan perilaku politik masyarakat. Humas pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Dalam konteks Pilkada, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media sosial dan teknologi informasi lainnya menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat yang beragam secara demografis. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara humas dan wartawan. Hubungan yang baik antara keduanya dapat membantu dalam mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik, sehingga mengurangi kemungkinan misinformasi. Dengan demikian, humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik, Diskominfo perlu terus mengembangkan model komunikasi yang lebih baik. Hal ini termasuk pelatihan bagi staf humas dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta strategi yang lebih inovatif dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, M Sayyidul, dan Moh. Solikul Hadi, "Integral Values in Madrasah: to Foster Community Trust in Education," *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2020), 160 <https://doi.org/10.24269/ijpi.v5i2.2736>

Anjas Pratiwi, dan M. Solikul Hadi, "The Urgence of Siti Bariyah's Thinking in Islamic Education 5.0," *Journal of Contemporary Islamic Education*, 2.2 (2022), 147–65 <https://doi.org/10.25217/jcie.v2i2.2579>

Azis, Hasbullah, 'DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN POLITIK ANAK MUDA : SEBUAH TINJAUAN', 8 (2024)

Fahmi Husein, Moh Solikul Hadi, Edi Kurniawan, "Strategi Digital Detox untuk Siswa : Efektivitas Pendidikan Islam melalui Program Bimbingan Konseling pada Anak SMA / SMK di Yogyakarta Penerbangan AAG Adisutjipto , penerapan strategi Digital Detox melalui program," 13 (2024), 358–69

Hadi, Moh. Solikul, "Implementasi Model Pengembangan Multiple Intellegence Dalam Meningkatkan Kecerdasan Natural Peserta Didik Melalui Metode Project Based Learning Di Kelas X Manpk Yogyakarta Pada Mata Pelajaran Fikih," 2018, 152 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33289/>

Hadi, Moh. Solikul, M. Sayyidul Abrori, dan Dwi Noviatul Zahra, "Pengembangan Multimedia Interaktif Macromedia Flash Profesional 8 Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis Kelas X Semester Genap Di Man 1 Yogyakarta," *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2020), 148 <https://doi.org/10.24127/att.v3i2.1123>

Hadi, Moh Solikul, Abdul Kahfi Amrullah, dan Khoerul Anwar, "Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies Membentuk Peserta Didik Menjadi Pribadi Ulul al-bab Prespektif," 1.1 (2024), 61–62

Hargittai. E. (2020). *Potential and pitfalls of digital inequality: Amplifying political engagement*.

Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha, 'Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap', *Jurnal Suara Hukum*, 1.2 (2019), 155 <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>

Juditha, Christiany, 'Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia', *Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 2019 (2019), 199–212

Justitia, Fiat, Jurnal Ilmu, and Hukum Volume, 'Issn 1978-5186', 6.1 (2012)

KPU Sulawesi Utara, *Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemilihan*, 2021

Kruikemeier, S., Van Noort, G., Vliegenthart, R., & De Vreese, C. H. (2016). The relationship between online campaigning and political involvement. *Online Information Review*, *40*(5), 673–694. https://doi.org/10.1108/OIR-11-2015-0346

Moh. Solikul Hadi, Muhammad Nuril Anam, M. Sayyidul Abrori, "Reconstruction Of Martin Heiddeger's Thinking Existentialism Model on Education inThe Industrial Era 4.0," *Journal of Research in Islamic Education*, 03.02 (2021), 47–58

Purba, Abdul Masri, 'Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis', *Network Media*, 7.1 (2024), 1–8 <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>

Putri. I. R. (2020). *Strategi Komunikasi Humas Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Pandemi*.

Ridhuan, Syamsu, 'Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila', *Universitas Esa Unggul*, 2019, 1–14

Smith. J. (2019). The role of public relations in political communication. Journal of Political Communication. *Journal of Political Communication*, *12*(2), 89–101

Sanur, D. (2018). Tantangan Dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018. *Info Singkat*, *10*(02), 25–30.

Satira, Ulfa, and Rossa Hidriani, 'Peran Penting Public Relations Di Era Digital', *Sadida: Islamic Communications Media Studies*, 1.1 (2021), 179–202

Solikhin. A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, *9*(3), 123–137.

S, Y. S., & Rahmawati, D. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal*, *7*(2), 150–156. https://doi.org/10.33603/signal.v7i2.2416

Wahyudi. M. (2020). *Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kepercayaan Publik*.

Wahyuni. S. (2018). *Strategi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*.